

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

One China Policy merupakan sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa hanya ada satu China yaitu *People's Republic of China* (PRC), dan *Republic of China* (ROC) atau yang dikenal juga sebagai Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Kebijakan ini diterapkan oleh China dan menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan ketegangan antara China dan Taiwan di dunia internasional. Ketegangan ini berawal sejak 1949 ketika perang saudara di Tiongkok berakhir dan pemerintahan ROC mundur ke Taiwan, dan berlanjut pada 1971 ketika PRC memperoleh kursi resmi di PBB yang semakin mengisolasi status Taiwan di dunia internasional. Sejak normalisasi hubungan Amerika Serikat dan China pada tahun 1979, banyak negara mengalihkan pengakuan diplomatik mereka ke PRC, sehingga pengaruh Taiwan dalam lembaga-lembaga global berkurang secara signifikan. Konflik kembali memanas pada tahun 1995-1996 melalui Krisis Selat Taiwan, terutama setelah terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen pada 2016 yang menolak prinsip *One China*. Kondisi ini menyebabkan eskalasi secara diplomatik maupun militer, meskipun Taiwan tetap mempertahankan sistem pemerintahan demokratis dan kebijakan luar negeri yang independen.

Kepemimpinan Xi Jinping membawa kebijakan politik *One China Policy* semakin diiringi oleh intensifikasi tindakan militer sebagai strategi peningkatan

tekanan terhadap Taiwan dan mempercepat reunifikasi. Tekanan ini ditunjukkan melalui peningkatan aktivitas militer di sekitar Selat Taiwan melalui latihan militer skala besar, termasuk *Joint Sword 2024A* dan latihan yang dilakukan pasca kunjungan Ketua DPR AS yakni Nancy Pelosi ke Taiwan pada tahun 2022, serta patroli angkatan udara serta laut. Latihan-latihan ini menjadi simulasi koordinasi kekuatan militer China dapat digunakan untuk melakukan invasi penuh terhadap Taiwan. China telah memperkuat kapabilitas *People's Liberation Army (PLA)* dalam melakukan proyeksi kekuatan di kawasan, termasuk pengerahan kapal perang, pesawat tempur, dan sistem rudal di sepanjang perbatasan Taiwan (Cordesman & Kendall, 2016). Modernisasi militer China mencakup pengembangan sistem rudal jarak menengah dan sistem pertahanan udara yang mampu menekan ruang gerak militer Taiwan. Menurut Wu (2023), peningkatan kemampuan strategis China, termasuk kehadiran pesawat tempur di *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* Taiwan, merupakan bagian dari strategi Beijing untuk menunjukkan dominasi regional dan melemahkan kepercayaan diri pertahanan Taiwan.

Pada tahap operasional, militer China semakin sering melakukan aktivitas yang menunjukkan kesiapannya untuk menghadapi Taiwan seperti saat Taiwan mendeteksi 103 jet tempur dan 9 kapal angkatan laut China beroperasi di sekitar perairan Taiwan pada 18 September 2023 (Blanchard & Yimou, 2023). Peristiwa ini diketahui sebagai salah satu tindakan militer China dengan jumlah armada terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada 14 Oktober 2024, PLA menggelar latihan militer yang hanya berlangsung satu hari, yang diklaim sebagai peringatan

keras terhadap tindakan separatis Taiwan (Thibault, 2024). Latihan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Presiden Taiwan, Lai Ching-te (William Lai) menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa China tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan, tetapi juga mengisyaratkan keinginan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Pernyataan Lai ini langsung mendapat reaksi keras dari Beijing yang menyebutnya sebagai bukti bahwa pemerintah Taiwan tetap bersikeras pada sikap separatisnya. Fenomena terbaru yang dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan, menyatakan sebanyak 45 pesawat tempur dan 14 kapal Angkatan Laut China telah beroperasi di perairan Taiwan dalam 24 jam terakhir pada 27 Februari 2025 (Tempo, 2025).

Terdapat perbedaan perspektif dalam melihat intensifikasi militer ini. Dari perspektif China, Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan China berdasarkan *One China Policy*, sehingga operasi militer yang dilakukan di sekitar wilayah Taiwan dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga integritas wilayahnya sendiri. Dalam pandangan ini, kehadiran pesawat tempur dan kapal perang di wilayah sekitar Taiwan bukanlah pelanggaran, melainkan bentuk proyeksi kekuatan yang sah dalam kerangka kedaulatan nasional. Sebaliknya, Taiwan melihat peningkatan aktivitas militer China sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatannya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat tempur China terhadap ADIZ Taiwan dipandang sebagai tindakan provokatif yang bertujuan untuk menekan pemerintah Taiwan dan menguji pertahanan negaranya. Selain itu, simulasi blokade serta latihan invasi yang dilakukan oleh PLA semakin memperkuat persepsi di Taiwan bahwa

China tengah mempersiapkan skenario serangan langsung terhadap pulau tersebut. Pada Maret 2024, komandan militer AS di kawasan Indo-Pasifik menyatakan bahwa China masih mempertahankan targetnya untuk dapat menginvasi Taiwan pada tahun 2027 (The Week, 2025). Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan fundamental dalam hubungan China-Taiwan, kedua klaim kedaulatan yang bertentangan terus menjadi sumber utama eskalasi konflik di Selat Taiwan.

Dinamika politik Taiwan di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen (2016-2024) dan penerusnya, Lai Ching-te, semakin menegaskan arah kebijakan keamanan Taiwan dalam menghadapi tekanan dari China. Pemerintahan Tsai menolak Konsensus 1992 dan memperkuat hubungan dengan sekutu strategis seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kebijakan ini semakin memicu reaksi keras dari China, yang menganggap pendekatan Taiwan sebagai ancaman bagi upaya reunifikasi. Setelah pemilu 2024, kemenangan Lai Ching-te dari *Democratic Progressive Party* (DPP) semakin menegaskan kebijakan pertahanan Taiwan yang berfokus pada peningkatan kapabilitas militer dan penguatan aliansi internasional. China memandang Lai sebagai politisi pro-kemerdekaan, yang berpotensi meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, terutama dalam konteks kebijakan keamanan dan hubungan dengan negara-negara sekutu.

Menghadapi intensifikasi aktivitas militer China di Selat Taiwan, Taiwan melakukan transformasi dalam strategi keamanannya. Peningkatan tekanan militer yang dilakukan oleh China telah mendorong Taiwan untuk menyesuaikan pendekatan pertahanannya guna menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Salah satu

langkah utama dalam transformasi ini adalah dengan melakukan modernisasi pertahanan serta meningkatkan kerja sama dengan sekutu strategis yaitu Amerika Serikat. Dalam upaya modernisasi pertahanan, Taiwan mengadopsi strategi pertahanan asimetris, yakni pendekatan militer yang berfokus pada pemanfaatan kapabilitas yang tidak simetris dengan lawan guna mengimbangi superioritas kekuatan militer China (Wu, 2023). Taiwan juga meningkatkan strategi *conventional deterrence* guna mencegah serangan skala penuh dari China dan mengembangkan kapabilitas *self-reliant defense* dengan meningkatkan produksi persenjataan serta mengembangkan industri militer dalam negeri sebagai bagian dari strategi pertahanan (Eaglen & Ferrari, 2022). Perubahan dalam strategi keamanan ini mencerminkan upaya Taiwan untuk mempertahankan stabilitas dan memastikan posisinya dalam dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

Peningkatan intensitas ancaman militer China di Selat Taiwan menciptakan dinamika keamanan yang semakin kompleks bagi Taiwan. Manuver militer yang semakin agresif, termasuk latihan perang skala besar dan penyusupan ke zona pertahanan udara Taiwan. Kondisi ini menuntut Taiwan untuk terus menyesuaikan strategi keamanan yang matang dan adaptif guna menghadapi ancaman yang semakin nyata. Penting untuk memahami persepsi Taiwan terkait ancaman dari China serta respons kebijakan keamanan dan pertahanannya. Konflik tersebut tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas domestik Taiwan dan China sebagai aktor utama, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap keamanan regional. Posisi Selat Taiwan sebagai salah satu jalur vital perdagangan global serta keterlibatan aktor-aktor

eksternal memiliki implikasi terhadap stabilitas kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji transformasi strategi keamanan Taiwan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, serta menganalisis sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap dinamika kawasan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa Taiwan melakukan transformasi strategi keamanan dalam merespons intensifikasi ancaman militer China pada 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai *berikut*:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan terkait keamanan tradisional dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah oleh aktor negara, terutama terkait transformasi strategi keamanan Taiwan terhadap ancaman intensifikasi militer China di Selat Taiwan tahun 2020-2024.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk menganalisis transformasi strategi keamanan Taiwan terhadap ancaman intensifikasi militer China di Selat Taiwan tahun 2020-2024 melalui pengembangan persepsi ancaman yang mendorong penyeimbangan dengan melakukan modernisasi pertahanan yang bersifat asimetris dan meningkatkan kerja sama informal dengan Amerika Serikat serta negara lain sebagai bentuk dari upaya pertahanan terhadap keamanan dan kedaulatan *de facto* Taiwan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu akademis dan praktisi yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi akademika yang berfokus di bidang hubungan internasional mengenai upaya transformasi strategi keamanan sebagai *balance of threat* untuk menghadapi ancaman intensifikasi militer yang berpotensi mengubah status keamanan wilayah suatu negara serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian atau studi di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan kajian pendukung bagi entitas publik yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu dinamika keamanan terkait maupun aspek lain dalam keamanan tradisional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Analisis transformasi strategi keamanan Taiwan terhadap ancaman intensifikasi militer China di Selat Taiwan tahun 2020-2024 memerlukan pemahaman terhadap berbagai literatur yang telah membahas dinamika keamanan di kawasan tersebut. Salah satu kajian awal yang relevan dalam memahami ancaman intensifikasi militer China terhadap Taiwan adalah penelitian Victoria Hans (2023) berjudul *Breaking the Enemy's Resistance Without Fighting: An Examination of P.R.C. Gray Zone Tactics in the Indo-Pacific*. Disertasi ini menyoroti strategi China untuk mengubah status quo di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terhadap Taiwan dan Jepang. Studi ini menunjukkan bahwa sejak 2020, China semakin mengandalkan tekanan militer terbatas, propaganda informasi, serta penggunaan *maritime militia* sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi strategis yang menguntungkan tanpa harus terlibat dalam perang terbuka. Dengan menggunakan kerangka teori *Balance of Power* dan *Balance of Threat*, penelitian ini menjelaskan

bahwa peningkatan aktivitas militer China dipengaruhi oleh persepsi ancaman terhadap nilai-nilai politik Taiwan serta dinamika kekuatan antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat. Dalam kasus Taiwan, strategi *gray zone* China mencakup serangkaian operasi yang bertujuan untuk memperlemah stabilitas politik dan pertahanan Taiwan secara bertahap. Salah satu taktik utama yang digunakan adalah peningkatan pelanggaran wilayah udara Taiwan, terutama dengan masuknya pesawat tempur dan pesawat pengebom China ke dalam *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Taiwan. Sejak 2020, jumlah pelanggaran ADIZ meningkat drastis, yang tidak hanya menguji respons pertahanan Taiwan tetapi juga berfungsi sebagai bentuk intimidasi psikologis (Hans, 2023). Selain itu, China juga telah melakukan simulasi blokade maritim dan udara dengan menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan, terutama setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada Agustus 2022. Latihan ini mencakup penembakan rudal balistik ke perairan sekitar Taiwan, simulasi pendaratan amfibi, dan patroli gabungan antara angkatan laut dan udara untuk memperkuat klaim teritorial China.

Selain penggunaan *gray zone tactics*, modernisasi militer China juga menjadi faktor utama dalam intensifikasi ancaman terhadap Taiwan. Ji You (2024), dalam penelitiannya *All for Winning the Next War: The Socio-Political and Technological Attributes of PLA Modernization through Continuing Force Transformation*, menyoroti eskalasi kekuatan militer China didorong oleh stabilitas sistem politik satu partai serta strategi perang berbasis

teknologi tinggi. Studi ini menunjukkan bahwa modernisasi PLA berfokus pada *informatization* dan *intelligentization warfare* melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI), perang siber, serta integrasi sistem elektronik yang memainkan peran kunci dalam strategi pertahanan dan ofensif China. Pengembangan teknologi hipersonik, perang elektronik, serta sistem *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) bertujuan untuk menunda atau menggagalkan intervensi Amerika Serikat dalam konflik di Selat Taiwan (You, 2024). PLA juga mempelajari berbagai konflik global seperti perang Ukraina, untuk memperbaiki strategi logistik dan penggunaan drone dalam pertempuran modern. Studi ini menggarisbawahi bahwa modernisasi militer China secara langsung meningkatkan ancaman bagi Taiwan, baik dari segi kesiapan operasi militer maupun tekanan psikologis yang dihasilkan dari peningkatan kapabilitas PLA.

Modernisasi militer China tidak hanya dilakukan melalui penguatan kapabilitas tempur PLA, tetapi juga melalui transformasi industri pertahanannya. Penelitian *China's Shift from CMI to MCF: Military Modernization and the Defense Industry at the Core* oleh Gokireddy Hima Bindu dan Amrita Jash (2024), menjelaskan perubahan konsep *Civil-Military Integration* (CMI) ke *Military-Civil Fusion* (MCF) sebagai strategi China dalam membangun industri pertahanan yang lebih inovatif dan mandiri. Sejak diadopsi sebagai kebijakan nasional pada 2015 di bawah kepemimpinan Xi Jinping, MCF bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi sipil ke dalam

pengembangan sistem persenjataan PLA, mengurangi ketergantungan pada impor teknologi asing, serta mempercepat inovasi dalam bidang kecerdasan buatan, perang siber, energi baru, dan teknologi kuantum (Bindu & Jash, 2024). Jurnal ini juga menyoroti industri pertahanan China yang mengalami pertumbuhan pesat, dengan perusahaan-perusahaan seperti AVIC dan NORINCO sebagai pemain utama dalam pasar senjata global. Implementasi MCF telah mempercepat reformasi dalam tubuh PLA, termasuk pengurangan jumlah personel darat, peningkatan kapabilitas Angkatan Udara dan Laut, serta pengembangan sistem tempur berbasis AI dan rudal hipersonik (Bindu & Jash, 2024). Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa melalui strategi ini, China semakin memperkuat dominasi militer di Indo-Pasifik, yang secara langsung meningkatkan ancaman bagi Taiwan. Oleh karena itu, perkembangan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi strategi keamanan Taiwan dalam menghadapi intensifikasi tekanan militer China selama periode 2020-2024.

Sebelum memasuki periode 2020-2024, kebijakan pertahanan Taiwan telah mengalami berbagai perubahan sebagai respons terhadap peningkatan kapabilitas militer China. Jean-Pierre Cabestan (2014) dalam penelitiannya *Recent Changes in Taiwan's Defense Policy and Taiwan-AS Relations*, membahas kombinasi pertahanan konvensional dan kapabilitas asimetris Taiwan guna menghadapi ancaman dari China. Studi ini menyoroti bahwa Taiwan tidak bertujuan untuk memenangkan perang langsung dengan PLA,

melainkan menunda serangan cukup lama agar AS dapat memberikan intervensi militer. Taiwan menerapkan konsep *resolute defense* dan *credible deterrence*, yang berarti memperkuat pertahanan agar serangan China menjadi mahal dan berisiko tinggi (Cabestan, 2014). Strategi ini diwujudkan melalui modernisasi sistem pertahanan rudal, peningkatan angkatan laut, serta penguatan pertahanan udara. Selain itu, Taiwan juga mulai mengadopsi strategi *porcupine strategy* yang menekankan pertahanan berbasis wilayah dan serangan balik terbatas untuk meningkatkan biaya perang bagi Beijing (Cabestan, 2014). Cabestan juga menggarisbawahi bahwa meskipun hubungan Taiwan-AS tetap menjadi faktor kunci dalam strategi pertahanan Taiwan, terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana AS akan memberikan dukungan jika terjadi konflik berskala besar. Studi ini memberikan gambaran mengenai evolusi kebijakan pertahanan Taiwan sebelum periode 2020-2024, yang menjadi dasar penting dalam memahami transformasi strategi keamanan Taiwan dalam menghadapi ancaman militer China yang semakin intensif.

Penelitian oleh Isti Nur Rahmahwati, Muhammad Arief Zulyan, Muhammad Faizal Alfian, dan Rahmat Syahid Suraya (2022) dalam jurnal *Awaken the Dragon: Threat Analysis to China-US Relations over Taiwan* memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bahwa persepsi ancaman berperan dalam membentuk dinamika konflik antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat. Persepsi ini memengaruhi perubahan strategi keamanan aktor negara yakni China dan Taiwan. Studi ini menunjukkan bahwa

peningkatan relasi Taiwan dengan Amerika Serikat tidak diwujudkan melalui bentuk aliansi formal, melainkan melalui pola kerja sama strategis yang bersifat fleksibel dan informal. Strategi ini dilakukan tanpa perjanjian pertahanan eksplisit, tetapi tetap didorong oleh kebutuhan untuk mengimbangi ancaman militer China yang semakin intensif. Di sisi lain, China menafsirkan peningkatan hubungan antara AS dan Taiwan sebagai bentuk *balancing* terhadap posisinya di Asia-Pasifik, dan merespons dengan preferensi ancaman langsung berupa unjuk kekuatan militer seperti yang terlihat dari latihan besar-besaran pasca kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei (Rahmahwati et al., 2022). Persepsi ini memperluas makna *external balancing* dalam teori *Balance of Threat*, dengan menekankan bahwa respons negara terhadap persepsi ancaman dapat diwujudkan melalui penguatan hubungan diplomatik, kerja sama teknologi militer, hingga pembentukan kemitraan strategis non-traktual. Dengan demikian, studi ini memperkuat argumen bahwa transformasi strategi keamanan Taiwan tidak selalu memerlukan institusionalisasi aliansi, tetapi dapat dilakukan melalui konsolidasi hubungan keamanan yang bersifat pragmatis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan ancaman.

Seiring dengan meningkatnya kapabilitas militer China, Taiwan secara bertahap mengalihkan strategi pertahanannya dari pendekatan konvensional ke pertahanan asimetris guna menghadapi ancaman yang semakin besar. Penelitian *Taiwan's Asymmetrical Defense: Policies and Alternatives* oleh

Wu Shang-Su (2023) menyoroti modernisasi PLA telah memaksa Taiwan untuk mengadopsi strategi *denial-oriented capabilities* sebagai bentuk *deterrence* terhadap potensi invasi China. Taiwan mulai berfokus pada pengembangan berbagai sistem pertahanan yang bertujuan untuk memperlambat dan menyulitkan operasi PLA, termasuk rudal anti-kapal, sistem pertahanan udara, serta perang ranjau laut (Wu, 2023). Salah satu elemen utama dalam strategi ini adalah *Hsiung-Feng anti-ship missiles* yang dirancang untuk menghancurkan kapal perang PLA dalam skenario konflik di Selat Taiwan (Su, 2023). Taiwan mengoperasikan beberapa varian seperti Hsiung-Feng II dan Hsiung-Feng III yang memiliki kemampuan serangan presisi tinggi terhadap kapal perang musuh, termasuk kapal induk dan kapal perusak. Hsiung-Feng III yang merupakan varian supersonik, diyakini mampu menembus sistem pertahanan kapal perang China dan memberikan efek pertahanan yang lebih besar. Taiwan juga memperkuat pertahanannya dengan *Tien-Kung air defense systems* yang dikembangkan sebagai alternatif terhadap sistem pertahanan udara Patriot. Sistem ini memiliki kemampuan mendeteksi dan mencegat rudal balistik serta pesawat tempur yang berpotensi digunakan PLA dalam serangan udara ke Taiwan (Wu, 2023). Dalam strategi asimetrisnya, Taiwan juga menempatkan *land-attack cruise missiles (LACM)* sebagai elemen penting dalam strategi serangan balik. LACM dirancang untuk menyerang target strategis di daratan China, seperti pangkalan militer dan pusat komando PLA. Dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan rudal

pertahanan biasa, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan daya gentar Taiwan dan menekan Beijing agar berpikir ulang sebelum melakukan serangan skala penuh (Wu, 2023). Untuk meningkatkan pertahanan udara dan menghadapi kemungkinan serangan udara PLA, Taiwan juga memperoleh sistem pertahanan udara Patriot dan pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Sistem pertahanan udara Patriot seperti varian PAC-3 dirancang untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal balistik serta pesawat musuh yang menjadi ancaman utama dari China (Wu, 2023). Studi ini memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana Taiwan mengadaptasi strategi asimetris untuk meningkatkan daya tahan pertahanannya, yang menjadi bagian dari transformasi strategi keamanan Taiwan dalam menghadapi ancaman militer China selama 2020-2024.

Peningkatan kapabilitas militer China dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan dinamika keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Eskalasi ancaman yang ditunjukkan melalui modernisasi PLA, intensifikasi latihan militer di sekitar Selat Taiwan, serta penerapan strategi *gray zone* yang semakin agresif, menempatkan Taiwan dalam situasi yang menuntut perubahan strategis. Kajian sebelumnya telah banyak membahas modernisasi militer China dan respons Taiwan, tetapi belum secara spesifik menganalisis intensifikasi sebagai faktor pembentuk persepsi ancaman yang memengaruhi transformasi strategi keamanan Taiwan. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada landasan historis kebijakan pertahanan Taiwan,

strategi asimetris secara umum, atau hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, tanpa memberikan analisis komprehensif mengenai perubahan kebijakan militer Taiwan secara dinamis sebagai respons terhadap peningkatan ancaman dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengeksplorasi perubahan nyata dalam strategi keamanan Taiwan di tengah intensifikasi tekanan militer China periode 2020-2024, serta mengevaluasi faktor-faktor utama yang memengaruhi perubahan strategi tersebut dalam konteks politik dan militer yang terus berkembang.

1.5.2. Konsep *Balance of Threat*

Pemikiran mengenai konsep *Balance of Threat* dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari akar historis teori realisme. Salah satu rujukan awal dapat ditemukan dalam karya Thucydides yaitu *History of the Peloponnesian War* (c. 431 SM), yang menekankan bahwa konflik antara Athena dan Sparta disebabkan oleh ketakutan Sparta terhadap meningkatnya kekuatan Athena. Hal ini menandai cikal bakal pemikiran bahwa ketakutan terhadap ancaman, bukan sekadar distribusi kekuatan, dapat memicu konflik. Thomas Hobbes dalam *Leviathan* (1651) kemudian memperkuat dasar ini dengan mengasumsikan bahwa dalam kondisi anarki tanpa otoritas tertinggi, negara (seperti individu dalam masyarakat alamiah Hobbes) akan saling mencurigai dan bersiap untuk berperang demi bertahan hidup. Kedua pemikir klasik ini meletakkan dasar pemahaman mengenai sistem internasional

sebagai lingkungan yang penuh ketidakpastian, di mana rasa takut dan ancaman menjadi kunci perilaku aktor negara.

Fondasi ini kemudian dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau melalui realisme klasik dalam karyanya yang berjudul *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1948), yang menyatakan bahwa politik internasional adalah arena perjuangan kekuasaan antarnegara, dan negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan. Dalam pandangan ini, strategi seperti aliansi dan kebijakan luar negeri biasanya didorong oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuasaan negara lain. Namun, pendekatan Morgenthau dianggap terlalu fokus pada sifat manusia dan kurang memperhatikan struktur internasional. Hal ini kemudian dikembangkan oleh Kenneth Waltz melalui neorealisme atau realisme struktural dalam *Theory of International Politics* (1979). Waltz menekankan bahwa sistem internasional yang anarkis memaksa negara untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan distribusi kekuatan dalam sistem. Negara dianggap sebagai unit-unit rasional yang berusaha mempertahankan posisinya dalam struktur internasional, dan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) menjadi mekanisme utama dalam mencegah dominasi oleh satu kekuatan (Waltz, 1979).

Konsep keseimbangan telah menjadi salah satu landasan utama untuk menjelaskan pola interaksi antarnegara dalam hubungan internasional. Aliansi dan kebijakan pertahanan suatu negara tidak hanya bergantung pada siapa

yang memiliki kekuatan lebih besar, tetapi juga siapa yang dianggap memiliki niat agresif dan kapabilitas ofensif yang berbahaya. Kondisi ini dikenal dengan istilah *balancing*. Pada titik ini, penyeimbangan antara struktur internasional dan faktor domestik, seperti persepsi pemimpin dan kemampuan negara, melahirkan konsep *Balance of Threat*. *Balance of Threat* terdiri dari dua kata utama dalam bahasa Inggris, yaitu *balance* yang berarti keseimbangan, dan *threat* yang berarti ancaman. *Balance of Threat* dapat dikategorikan sebagai pengembangan dari konsep *Balance of Power*, tetapi dengan penekanan pada persepsi ancaman (*threat perception*) dibandingkan sekadar distribusi kekuatan (*power distribution*). Jika *Balance of Power* menyatakan bahwa negara-negara menyeimbangkan kekuatan yang dominan untuk menghindari dominasi satu aktor tertentu, maka *Balance of Threat* berargumen bahwa negara lebih cenderung merespons ancaman yang dialami, bukan sekadar perbedaan kapabilitas kekuatan.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Stephen Walt dalam *Alliance Formation and the Balance of World Power* (1985) dan dikembangkan lebih lanjut dalam *The Origins of Alliances* (1987). Walt mengoreksi pandangan klasik dalam realisme yang menekankan bahwa negara secara otomatis menyeimbangkan kekuatan terbesar dalam sistem internasional. Negara akan lebih memilih untuk menyeimbangkan ancaman atau *balancing*, atau dalam beberapa kasus, bergabung dengan kekuatan dominan jika menguntungkan *bandwagoning* (Walt, 1987). Kedua strategi ini

bergantung pada beberapa elemen persepsi tingkat ancaman. Dengan demikian, tidak ada satu strategi yang secara mutlak lebih dipilih oleh negara, karena setiap keputusan aliansi bersifat kontekstual dan bergantung pada kondisi yang dihadapi.

Aliansi bukan hanya respons terhadap ancaman langsung, tetapi juga dapat menjadi alat untuk menegosiasikan posisi suatu negara dalam sistem internasional. Salah satu bentuk aliansi yang berkembang adalah *entente* yaitu aliansi berbasis kesepakatan informal yang tidak mengharuskan komitmen militer eksplisit. *Entente* memberikan fleksibilitas bagi negara untuk menjaga hubungan strategis tanpa harus terikat dalam perjanjian pertahanan kolektif yang bersifat mengikat (Snyder, 1997). Keputusan negara untuk membentuk *entente* dapat didorong oleh berbagai pertimbangan seperti keinginan untuk menyeimbangkan ancaman tanpa terlibat langsung dalam konflik atau untuk memperkuat hubungan dengan kekuatan dominan tanpa komitmen militer yang ketat. Keputusan aliansi lebih biasanya dipengaruhi oleh seberapa besar suatu negara dipersepsikan sebagai ancaman daripada sekadar kekuatannya (Walt, 1987).

Terdapat empat faktor utama yang menentukan persepsi tingkat ancaman (*threat perception*) suatu negara. Argumen pertama, Walt (1987) menjelaskan bahwa kapabilitas agregat (*aggregate power*) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat ancaman suatu negara. Kapabilitas ini mencakup keseluruhan kekuatan militer, ekonomi, populasi, dan akses

terhadap sumber daya strategis. Negara dengan kapabilitas yang besar memang memiliki potensi yang lebih besar untuk menciptakan ancaman terhadap negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, Walt menegaskan bahwa kapabilitas besar tidak secara otomatis membuat suatu negara menjadi ancaman, tergantung pada faktor lain seperti niat politik dan strategi keamanan negara tersebut.

Argumen kedua, Walt (1987) menambahkan bahwa proksimitas geografis (*geographic proximity*) turut menentukan tingkat persepsi ancaman antarnegara. Negara yang secara geografis berada dalam jarak dekat lebih cenderung dipersepsikan sebagai ancaman dibandingkan dengan negara yang letaknya jauh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara yang berdekatan lebih mungkin memiliki konflik kepentingan langsung, baik dalam bentuk perebutan wilayah, sengketa sumber daya, maupun potensi intervensi militer. Oleh karena itu, negara-negara sering kali membentuk aliansi untuk mengimbangi potensi ancaman dari negara-negara tetangga. Kondisi seperti ini membuat kedekatan geografis menjadi salah satu variabel penting dalam mendorong pembentukan pola kerja sama pertahanan regional.

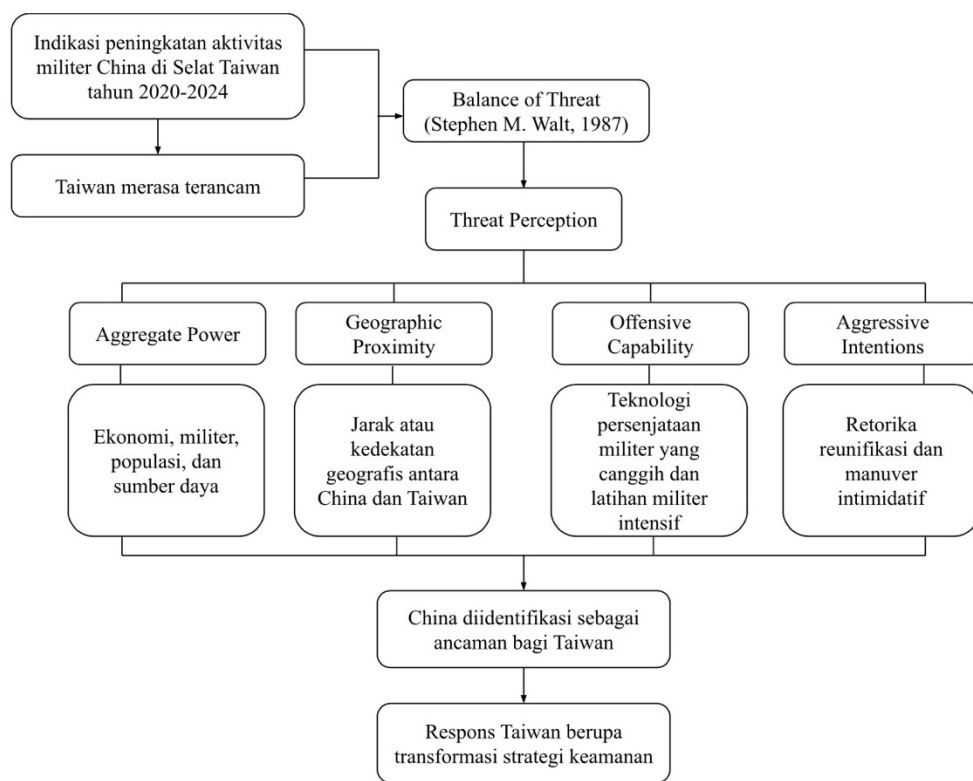
Argumen ketiga, Walt (1987) menyoroti pentingnya kapabilitas ofensif (*offensive capability*) sebagai elemen yang meningkatkan persepsi ancaman. Kapabilitas ofensif merujuk pada sejauh mana suatu negara mampu melancarkan serangan militer ke luar wilayahnya dan menimbulkan kerusakan pada negara lain. Negara yang memiliki kekuatan militer dengan kapasitas

ofensif yang tinggi seperti proyeksi sistem persenjataan melalui teknologi canggih dan mobilitas militer yang tinggi, akan lebih mudah dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Berbeda dengan negara yang kapabilitas militernya bersifat defensif atau terbatas pada perlindungan dan pertahanan domestik, negara dengan potensi ofensif tinggi menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan agresi, terutama jika dikombinasikan dengan ambisi politik luar negeri yang ekspansif.

Argumen keempat dan terakhir, Walt (1987) menekankan bahwa intensi agresif (*aggressive intentions*) merupakan faktor yang bersifat subjektif namun tidak kalah penting dalam membentuk persepsi ancaman. Intensi ini merujuk pada penilaian terhadap niat dan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Negara yang menunjukkan perilaku agresif melalui retorika politik, ekspansi militer khususnya di perbatasan, atau tindakan yang dianggap provokatif lebih cepat dikategorikan sebagai ancaman oleh negara lain. Bahkan negara dengan kapabilitas besar sekalipun tidak akan dianggap mengancam jika menunjukkan sikap yang kooperatif dan kebijakan luar negeri yang moderat dan stabil. Sebaliknya, negara kecil yang bersikap agresif tetap bisa menimbulkan kecemasan strategis bagi negara tetangganya.

Konsep *Balance of Threat* tetap menjadi pendekatan utama dalam menjelaskan pola aliansi dan strategi keamanan negara. Negara-negara tidak hanya melihat distribusi kekuatan global, tetapi juga menilai ancaman berdasarkan faktor kapabilitas, geografi, kemampuan ofensif, dan intensi

politik. Dengan adanya variasi dalam cara negara melakukan *balancing* melalui *threat perception*, konsep ini memberikan perspektif yang lebih fleksibel dalam memahami respons negara terhadap perubahan lingkungan strategis mereka.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada persepsi Taiwan dalam mengidentifikasi dinamika ancaman China melalui pendekatan *threat perception*. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun China telah diidentifikasi

sebagai ancaman laten bagi Taiwan, persepsi terhadap ancaman tersebut bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring perkembangan situasi strategis. Proyeksi *threat perception* dianalisis melalui indikator kekuatan agregat, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan niat agresif. Sehingga hasil identifikasi ancaman dan respons kebijakan yang dihasilkan dapat berbeda pada setiap periode, tergantung dinamika hubungan dan intensitas ancaman yang berkembang.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Aggregate Power*

Stephen Walt (1987) mendefinisikan *aggregate power* sebagai faktor pertama dalam persepsi ancaman, yang mencakup kekuatan militer, kekuatan ekonomi, populasi, serta kendali terhadap sumber daya strategis. Negara dengan *aggregate power* besar dianggap memiliki potensi untuk mengancam karena kemampuan proyeksi kekuatannya lebih besar. Namun, Walt menegaskan bahwa potensi tersebut belum tentu mutlak jika tidak disertai dengan niat agresif. Dalam studi kasus penelitian ini, *aggregate power* China jauh berada di tingkat yang berbeda dengan Taiwan, baik dari sisi kekuatan militer maupun ekonomi. Oleh karena itu, *aggregate power* dapat dipahami sebagai total kapabilitas strategis suatu negara yang dinilai relevan untuk

menimbulkan ancaman terhadap negara lain, khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan mencolok seperti antara China dan Taiwan.

1.6.1.2. *Geographic Proximity*

Kedekatan geografis menjadi faktor penting karena kedekatan fisik dapat meningkatkan kemungkinan interaksi langsung termasuk konflik (Walt, 1985). Negara yang saling berdekatan secara geografis lebih mungkin memiliki kepentingan yang tumpang tindih, baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan. Dalam kasus Taiwan dan China, kedekatan geografis melalui Selat Taiwan bukan hanya menciptakan kerentanan terhadap serangan langsung, tetapi juga memunculkan ancaman blokade, infiltrasi udara, dan kontrol atas jalur laut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, *geographic proximity* dipahami sebagai rentang geografis aktor yang memiliki kapabilitas militer dengan target potensial, yang dapat meningkatkan urgensi strategi pertahanan Taiwan.

1.6.1.3. *Offensive Capability*

Walt (1987) juga menyoroti kapabilitas ofensif sebagai faktor penting dalam persepsi ancaman karena negara yang memiliki kemampuan menyerang secara efektif ke wilayah lain cenderung dipersepsikan sebagai ancaman lebih besar, dibandingkan negara yang hanya fokus pada pertahanan. Kapabilitas ini ditentukan oleh jenis senjata yang dimiliki, jangkauan operasional militer, dan kemampuan suatu negara untuk melancarkan serangan cepat dan presisi. Dalam perspektif penelitian ini, militer China telah

menunjukkan modernisasi yang signifikan dalam hal teknologi persenjataan, pembangunan kapal induk, dan latihan amfibi di sekitar Taiwan. Maka dari itu, kapabilitas ofensif dipahami sebagai kapasitas nyata dari suatu negara untuk melancarkan agresi militer terhadap aktor lain dalam sistem internasional.

1.6.1.4. *Aggressive Intentions*

Terakhir, Walt (1987) menekankan bahwa niat agresif, meskipun bersifat subjektif, merupakan indikator penting dalam persepsi ancaman. Niat tersebut bisa diukur dari pernyataan politik, doktrin militer, atau tindakan provokatif yang berulang. Dalam kasus China dan Taiwan, retorika resmi pemerintah China tentang “reunifikasi” dengan segala cara, termasuk kekerasan, serta reaksi keras terhadap dukungan internasional bagi Taiwan, merupakan sinyal dari niat yang bersifat agresif. Oleh karena itu, *aggressive intentions* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai persepsi atas tujuan ekspansionis atau agresif suatu negara yang dapat diamati melalui narasi politik dan manuver militer.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Aggregate Power*

Aggregate power diidentifikasi dengan membandingkan elemen-elemen dasar kekuatan nasional antara China dan Taiwan, yang mencakup aspek kekuatan militer, kapasitas ekonomi, jumlah penduduk, serta akses

terhadap sumber daya strategis. Perbandingan ini dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengacu pada data kuantitatif dari lembaga-lembaga resmi seperti SIPRI, World Bank, dan IMF. Misalnya, anggaran militer China pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 220 miliar USD, sedangkan Taiwan hanya sekitar 19 miliar USD. Populasi China mencapai 1,4 miliar jiwa. Angka ini memiliki gap yang sangat jauh jika dibandingkan Taiwan dengan jumlah sekitar 23 juta jiwa. Dengan perbandingan data ini, *aggregate power* China yang jauh melampaui Taiwan dapat menunjukkan ketimpangan faktor antara kedua negara sehingga memperbesar potensi ancaman struktural bagi Taiwan dan menjadi dasar rasional di balik adopsi strategi pertahanan asimetris.

1.6.2.2. *Geographic Proximity*

Variabel *geographic proximity* dioperasionalkan melalui analisis posisi geografis Taiwan dan China yang berjarak sekitar 180-200 km di Selat Taiwan. Kajian ini mencakup pengamatan terhadap jarak strategis antara wilayah-wilayah militer utama China, seperti Fujian dan Guangdong, dengan pulau utama Taiwan. Proksimitas ini diperkuat dengan data intensitas patroli dan latihan militer China di sekitar wilayah udara dan perairan Taiwan. Misalnya, pelanggaran ADIZ (*Air Defense Identification Zone*) oleh pesawat tempur China yang meningkat drastis sejak 2020. Proksimitas ini dihitung secara spasial dengan bantuan peta strategis dan laporan pengamatan satelit, yang memperlihatkan bahwa jarak yang dekat dapat memperbesar potensi

ancaman berupa intervensi militer langsung, sekaligus meningkatkan urgensi perumusan respons strategis yang cepat dan efisien dari pihak Taiwan. Dengan demikian, kedekatan geografis digunakan untuk menilai tingkat keterpaparan langsung Taiwan terhadap agresi militer China.

1.6.2.3. *Offensive Capability*

Offensive capability dioperasionalkan berdasarkan tingkat kemampuan China dalam melakukan proyeksi kekuatan militer ke luar wilayahnya seperti jenis dan jangkauan sistem persenjataan, kapasitas proyeksi rudal balistik, sistem komando, kontrol militer, kapal induk dan kesiapan pasukan amfibi serta angkatan laut. Evaluasi ini difokuskan pada sistem persenjataan strategis seperti DF-17, J-20, serta modernisasi armada AL China yang beroperasi di wilayah Indo-Pasifik. Beberapa fakta tersebut menunjukkan seberapa besar kemampuan PLA untuk menyerang secara ofensif yang memperkuat persepsi ancaman terhadap Taiwan.

1.6.2.4. *Aggressive Intentions*

Aggressive intentions diukur dari analisis kebijakan luar negeri, narasi dan retorika politik, serta pola tindakan militer China, khususnya selama periode 2020-2024. Operasionalisasi dianalisis melalui studi terhadap pernyataan pejabat politik China, salah satunya adalah pidato Presiden Xi Jinping pada tahun 2021 mengenai “reunifikasi” dengan Taiwan. Retorika ini kemudian disertai dengan reaksi negatif akibat kunjungan pejabat politik asing ke Taipei melalui peningkatan sifat provokatif seperti pelaksanaan

latihan militer di sekitar Selat Taiwan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan tindakan yang koersif dalam strategi diplomatik China. Analisis ini mencakup frekuensi eskalasi militer yang tidak proporsional terhadap peristiwa tertentu, yang mencerminkan intensi politik China terhadap integrasi Taiwan. Persepsi Taiwan atas intensi agresif inilah yang memicu penguatan postur pertahanan nasional melalui transformasi strategi keamanan untuk mengimbangi ancaman China melalui pertahanan yang bersifat asimetris.

1.7. Argumen Penelitian

Transformasi strategi keamanan Taiwan merupakan respons terhadap intensifikasi militer China sepanjang 2020-2024 yang dapat dijelaskan berdasarkan empat indikator dalam konsep *Balance of Threat* yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capability*, dan *aggressive intentions*. Ketimpangan kekuatan agregat, kedekatan geografis, dan peningkatan kapabilitas ofensif China membentuk tekanan ancaman struktural terhadap keamanan Taiwan, dan diperkuat oleh persepsi niat agresif China melalui aktivitas militer dan retorika politik. Kombinasi ancaman struktural dan intensional ini menghasilkan persepsi ancaman, yang mendorong Taiwan melakukan transformasi strategi pertahanan dan keamanan. Transformasi tersebut tercermin dalam pergeseran dari strategi pertahanan konvensional menuju strategi pertahanan asimetris, peningkatan sistem pengawasan dan pencegahan dini, serta diversifikasi kerja sama keamanan melalui aliansi eksternal yang bersifat

informal. Strategi Taiwan tidak hanya merepresentasikan adaptasi teknis akibat ketimpangan kekuatan militer, tetapi juga dalam bentuk strategi politik untuk mempertahankan status quo di tengah tekanan struktural dari kekuatan dominan.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis dan interpretasi terhadap data yang bersifat naratif. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis kompleksitas dan dinamika strategi keamanan Taiwan yang terus berkembang di bawah tekanan militer China di Selat Taiwan. Dalam metode ini, peneliti berupaya menjelaskan keterkaitan antara persepsi ancaman Taiwan yang muncul terhadap China dengan perubahan kebijakan keamanan yang bersifat adaptif dan strategis. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menjangkau makna sosial dan politik yang tersembunyi di balik kebijakan, wacana, serta tindakan strategis para aktor negara.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-eksplanatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber ancaman yang dihadapi Taiwan serta menjelaskan alasan dan proses pertimbangan Taiwan dalam melakukan transformasi strategi sebagai bentuk penyeimbangan terhadap ancaman keamanan regional berdasarkan temuan empiris. Penelitian ini menempatkan fenomena keamanan sebagai peristiwa dinamis yang dihasilkan dari interaksi antara persepsi, kepentingan nasional, dan kalkulasi strategis.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini tidak merujuk pada lokasi geografis yang spesifik dalam pemahaman konvensional, melainkan berada pada ranah interaksi strategis di kawasan Selat Taiwan. Selat ini dipandang sebagai ruang geopolitik dan geostrategis yang menjadi arena utama dalam ketegangan antara Taiwan dan China. Penelusuran data dilakukan dengan menelaah berbagai publikasi dan dokumen yang berasal dari institusi-institusi di Taiwan, seperti Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan, Dewan Keamanan Nasional, serta sumber-sumber resmi militer China yang terlibat dalam dinamika di kawasan tersebut. Selain itu, jurnal atau pusat kajian strategis regional dan internasional seperti *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, *International Institute for Strategic Studies (IISS)*, dan *Brookings Institution* juga dijadikan sebagai referensi untuk memperoleh proses analisis yang lebih luas dan objektif.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup institusi-institusi negara, khususnya yang berada dalam lingkup keamanan dan pertahanan nasional Taiwan. Subjek penelitian difokuskan terhadap aktor pembuat kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi arah strategi keamanan negara seperti presiden, pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan, penasihat keamanan nasional, serta elite politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mencakup berbagai bentuk narasi dan dokumen yang relevan untuk memahami fenomena yang dikaji. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2013) dalam buku “*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*”, data kualitatif bersifat kontekstual dan memungkinkan analisis tematik yang mendalam terhadap makna, struktur, dan relasi kuasa dalam konteks sosial tertentu. Data ini berbentuk deskripsi, argumentasi, dan penjabaran yang ditemukan dalam dokumen kebijakan, laporan pertahanan resmi, transkrip pidato pejabat negara, jurnal artikel, dan media berita terpercaya. Jenis data ini dipilih karena mampu menangkap makna di balik fenomena kebijakan dan memberikan ruang interpretatif untuk menelusuri proses pembentukan persepsi ancaman yang ikonversi menjadi kebijakan nyata di lapangan.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari publikasi dan dokumen resmi pemerintah, serta transkrip pernyataan pejabat tinggi negara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui laporan *think tank*, publikasi akademik, serta berita dari media internasional dan regional yang kredibel. Penggunaan dua sumber data ini bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan-temuan penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh dan valid.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau studi kepustakaan yaitu proses sistematis untuk menelusuri, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, studi literatur tidak hanya sebagai pelengkap data, tetapi juga dapat berperan sebagai sumber utama ketika fenomena yang dikaji bersifat makro dengan karakteristik isu yang sensitif sehingga menyebabkan keterbatasan akses terhadap aktor strategis untuk melakukan observasi atau wawancara langsung (Bowen, 2009) Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah dipublikasikan secara luas dan terbuka, serta menafsirkan dinamika hubungan keamanan dan strategi pertahanan dari berbagai sumber dan sudut pandang.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap isu atau fenomena secara tematik. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menangkap berbagai sisi dan perubahan yang terjadi, serta lebih sesuai dengan sifat data yang berasal dari berbagai sumber dan periode. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting, mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, dan menemukan tema utama dari dokumen serta data yang dikaji. Proses analisis ini dilakukan secara iteratif, yakni melalui proses bolak-balik antara data empiris dan teori yang digunakan, untuk menghasilkan

pemahaman dan interpretasi yang mendalam terhadap dinamika transformasi strategi keamanan Taiwan (Miles et al., 2013). Maka dari itu, interpretasi data dilakukan dengan merujuk pada kerangka konsep *balance of threat*, untuk menyoroti hubungan antara persepsi ancaman yang berkembang dengan respon strategis yang diambil oleh Taiwan. Interpretasi terhadap data dilakukan dengan mengaitkan setiap temuan empiris berupa fenomena dengan konstruksi teoritis mengenai persepsi, intensitas ancaman, dan aliansi strategis, sehingga pembentukan kebijakan keamanan dapat dijelaskan secara logis dan sistematis.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Analisis data yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan strategis pertahanan, publikasi lembaga internasional, artikel jurnal akademik, buku ilmiah, serta media massa yang memiliki reputasi kredibel disusun secara sistematis melalui proses pengumpulan, seleksi, pengelompokan, dan penelaahan ulang sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap temuan dibandingkan dan diverifikasi dengan sumber lain yang sejenis untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Apabila ditemukan perbedaan data, peneliti melakukan penelusuran tambahan serta analisis ulang agar interpretasi yang dihasilkan tetap proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses yang terstruktur ini mendukung validitas dan konsistensi hasil penelitian.